



Penguatan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Studi Kasus : DPS Logawa, Kabupaten Banyumas

Irawadi¹, Sigit Supadmo Arif², Sahid Susanto², Lilik Sutiarmo²

¹Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas

²Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian, UGM

Email*: irawadi.dpu@gmail.com

Diterima Mei 2023; Disetujui Mei 2023; Dipublikasi Juni 2023

Abstrak. Asas *good water resources governance* baru akan dapat tercapai apabila pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan melalui suatu perencanaan yang utuh dan terpadu (hulu, tengah, hilir), menyeluruh (antar dan lintas sektor), berkelanjutan dan berbasis kelestarian lingkungannya, mencakup aspek teknis, aspek asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, aspek tata kelola pemerintahan desentralisasi yang berlaku; dan aspek masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam pemanfaatan DAS serta aspek kontrol, transparansi, akuntabilitas hasil yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas dan banyak mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan, sedang evaluasi kebijakan pengelolaan DAS dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan perlu dikuatkan melalui : (1) Meningkatkan hermonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS; (2) Mewujudkan pembentukan Forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders; (3) Mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS dan (4) Mewujudkan Pemahaman Bersama tentang Pengelolaan DAS.

Kata Kunci : *Pengelolaan DAS, Kebijakan, Analisis SWOT*

1. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan akses secara adil, efisien dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air sehingga mampu berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif serta mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.



Permasalahan penyediaan air di Indonesia juga di pengaruhi oleh (Fatah, 2006): (i) penyediaan dana alokasi dari pemerintah (Pusat maupun Daerah) untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di bawah standar ideal luas dan permasalahan yang ada; (ii) belum dilibatkannya secara optimal peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan DAS; (iv) belum tercapainya koordinasi dan pendekatan integratif secara optimal termasuk pendanaan antar sektor dalam penanganan pengelolaan DAS; (v) masih lemahnya budaya pemeliharaan prasarana pengelolaan DAS pasca konstruksi dan meningkatnya satuan biaya pemeliharaan prasarana. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada maka penanganan DAS harus melalui pengelolaan sistem DAS dengan pendekatan basis modal teknologi dan budaya, yaitu gabungan dari modal sosial dan modal kelembagaan, yang berarti aset manusia sebagai pelaku pemangku kepentingan pengelola dan pemanfaat DAS harus saling paham dan bersinergi menuju terwujudnya tata pemerintahan sumberdaya air yang baik (*good water resources governance*).

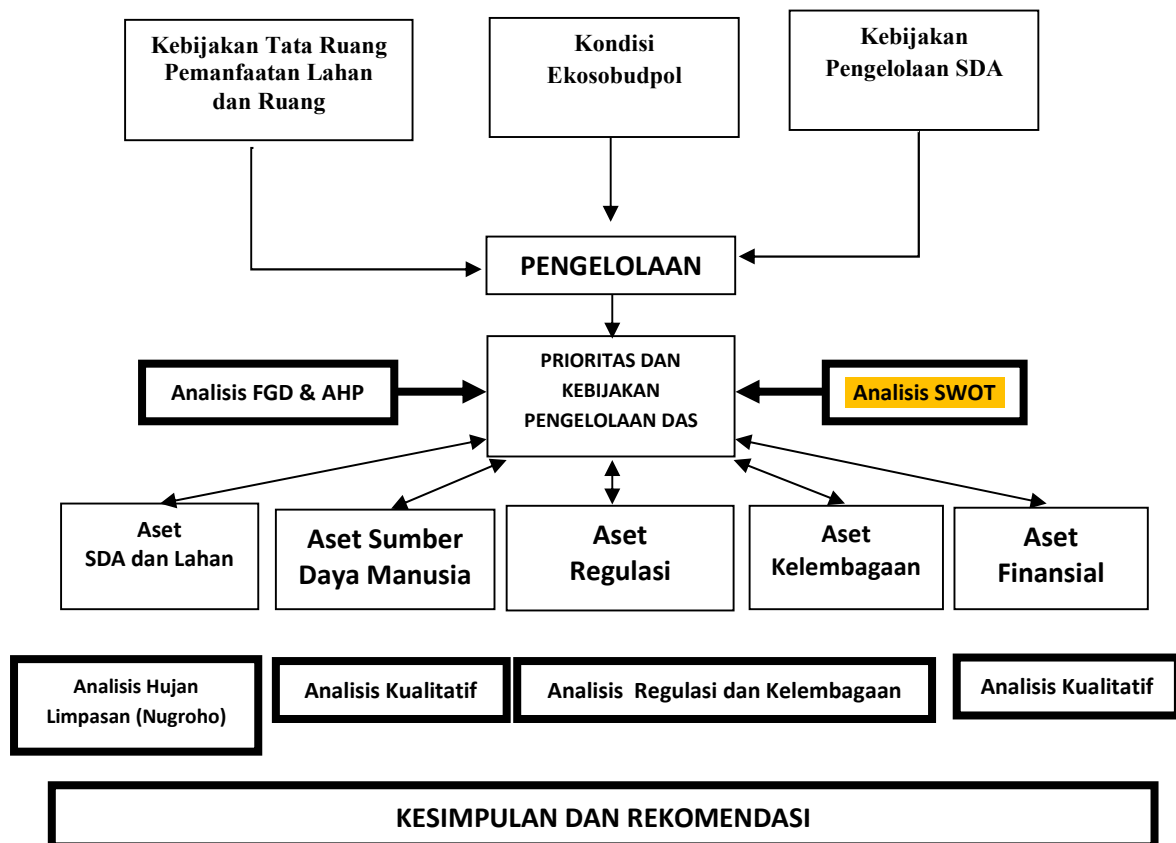
Asas *good water resources governance* baru akan dapat tercapai apabila pengelolaan DAS dilakukan melalui suatu perencanaan yang utuh dan terpadu (hulu, tengah, hilir), menyeluruh (antar dan lintas sektor), berkelanjutan dan berbasis kelestarian lingkungannya. Pertimbangan penanganan pengelolaan secara menyeluruh (hulu, tengah, hilir) juga mencakup aspek: (i) teknis yang akan dipergunakan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada (kondisi fisik DAS, sosial, ekonomi dan budaya); (ii) asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi seluruh stakeholders yang terlibat, khususnya dalam kegiatan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan perencanaan penanganan; (iii) tata kelola pemerintahan desentralisasi yang berlaku; (iv) masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam pemanfaatan DAS harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan; (v) aspek kontrol, transparansi, akuntabilitas hasil yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan. Uraian tahapan tersebut perlu dilakukan karena seluruh komponen yang terkandung dan mendukung pengelolaan pemanfaatan DAS merupakan aset-aset yang berharga dan perlu dipertahankan sifat keberlanjutannya. Guna mewujudkan perubahan paradigma pengelolaan DAS yang berkelanjutan diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan DAS.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum jelasnya kebijakan pengelolaan DAS guna mengoptimalkan kondisi dan fungsi DAS secara berkelanjutan terutama dalam mengatur dan menyediakan air dan lahan secara adil, efisien dan berkelanjutan kepada seluruh stakeholders sehingga dapat mencegah terjadinya degradasi lahan dan air.

Beberapa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguatkan kebijakan pengelolaan DAS, mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan DAS, meningkatkan kualitas hasil pengelolaan DAS dan untuk mengetahui alternatif pengelolaan lahan yang diterapkan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas dan banyak mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan, sedang evaluasi kebijakan pengelolaan DAS dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*)



Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian (Kedudukan Analisis SWOT)

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Metode Analisis Kebijakan Pengelolaan DAS

Pengkajian terhadap kebijakan yang telah ada di DPS Logawa yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda maupun kebijakan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pengelolaan DAS. Evaluasi kebijakan pengelolaan DAS ini dilakukan dengan metode *SWOT Analysis* yang digunakan untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang ada di wilayah penelitian. Analisis ini diharapkan dapat menunjukkan identifikasi kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh institusi yang paling bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan DAS. Dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah berbagai potensi dan kendala yang penting menjadi suatu strategi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang potensial untuk dikerjakan. Alat analisis yang digunakan meliputi : *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*. Potensi merupakan keunggulan sumberdaya, ketrampilan, kemampuan atau aspek internal lainnya yang dimiliki. Permasalahan lainnya adalah kelemahan atau keterbatasan atau ketidakefisienan sumberdaya, ketrampilan dan kemampuan.

Analisis *SWOT* digunakan agar mempermudah dalam:

- Memberikan gambaran tentang permasalahan yang perlu diidentifikasi untuk keperluan tertentu.
- Menganalisis hubungan antara permasalahan.
- Memberikan skenario keadaan sekarang dan masa yang akan datang, yang mana penjelasan tiap-tiap potensi dan permasalahan dilakukan dengan deskriptif kualitatif (*Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*).

Setelah faktor strategi internal dan eksternal dapat ditentukan, maka masing-masing faktor yang sebelumnya dilihat secara terpisah, kemudian digabungkan dalam matrik (2 x 2). Dari proses Analisis *SWOT* akan menghasilkan beberapa strategi, antara lain :

- a. Strategi SO, yang digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.
- b. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal.



- c. Strategi ST, bertujuan untuk memperkecil dampak yang akan terjadi dari lingkungan eksternal.
- d. Strategi WT, bertujuan untuk memperkuat diri dalam usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan mengurangi tantangan eksternal.

Adapun tahapan SWOT meliputi :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Visi, Misi dan Nilai
5. Identifikasi Lingkungan Stratejik
6. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)
7. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)
8. Matrik KAFI vs KAFE
9. Urutan Asumsi Pilihan Stratejik
10. Faktor Kunci Keberhasilan FKK
11. Menetapkan Tujuan.

Visi pengelolaan DAS dapat ditetapkan sebagai berikut **“Terwujudnya kemanfaatan DAS (sumber daya air dan lahan) yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”** (UU No.7/ 2004 Psl. 2) dengan misi (UU No. 7/ 2004 Psl. 11) sebagai berikut :

1. Konservasi SDA dan lahan secara berkelanjutan
2. Pendayagunaan SDA dan lahan yang adil bagi berbagai kebutuhan masyarakat
3. Pengendalian dan Penanggulangan daya rusak air dan lahan
4. Pemberdayaan dan Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam pengelolaan DAS
5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi DAS

3.2 Azas-azas

Azas adalah nilai/ ukuran yang mengandung kebenaran perbaikan mengenai keyakinan dan perilaku kelembagaan yang paling dianut dan digunakan sehingga budaya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi kelembagaan. Azas-azas yang dianut dalam Pengelolaan DAS adalah : **(1) Kelestarian;**

(2) Keseimbangan; 3) Kemanfaatan Umum; 4) Keterpaduan dan Keresasian; 5) Keadilan; 6) Kemandirian dan 7) Transparansi dan Akuntabilitas. Pencermatan lingkungan internal (PLI) mencermati kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan pengelolaan DAS, sedangkan pencermatan lingkungan eksternal (PLE) mencermati peluang dan tantangan yang ada di luar pengelolaan DAS.

Tabel 1. Identifikasi Lingkungan Stratejik

INTERNAL		EKSTERNAL							
KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)		PELUANG (<i>OPORTUNITIES</i>)							
1. Potensi sumber daya air dan lahan di DAS	2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengelolaan DAS	3. Adanya kewenangan kelembagaan pengelolaan DAS	4. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha	5. Kemajuan iptek di bidang pengelolaan DAS	1. Kebutuhan sumber daya air dan lahan	2. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS	3. Kebijakan pembentukan forum DAS	4. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan	5. Peran LSM dan Perguruan Tinggi
KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)		TANTANGAN (<i>THREATS</i>)							
1. Lemahnya pengelolaan sumber daya air dan lahan	2. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengelolaan DAS belum kuat dan mengikat seluruh stakeholders	3. Kewenangan kelembagaan belum terpadu	4. Masyarakat dan dunia usaha belum dilibatkan dalam pengelolaan DAS	5. Pemahaman Pengelolaan DAS oleh Pemangku Kepentingan	1. Proses hidrologi wilayah berubah, menurunkan ketersediaan air	2. Sistem Politik, Kebijakan pemerintah dan otonomi daerah	3. Biaya Pengelolaan DAS yang besar	4. Air tidak hanya bernilai sosial tapi juga bernilai ekonomi	5. Kemampuan keuangan negara

Dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal (PLI dan PLE), setelah dibobot dan dirating menghasilkan KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal) dan KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal).



Tabel 2. Format KAFI

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (3 x 4)	Kesimpulan (Prioritas)
1	2	3	4	5	6
KEKUATAN					
1	Potensi sumber daya air dan lahan di DAS	9	3	36	IV
2	Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengelolaan DAS	12	4	48	I
3	Adanya kewenangan kelembagaan pengelolaan DAS	11	4	44	II
4	Pertisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha	10	4	40	III
5	Kemajuan iptek di bidang pengelolaan DAS	8	3	24	V
KELEMAHAN					
1	Lemahnya pengelolaan sumber daya air dan lahan	9	3	36	IV
2	Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengelolaan DAS belum kuat dan mengikat seluruh stakeholders	12	4	48	I
3	Kewenangan kelembagaan belum terpadu	11	4	44	II
4	Masyarakat dan dunia usaha belum dilibatkan dalam pengelolaan DAS	8	3	24	V
5	Pemahaman Pengelolaan DAS oleh Pemangku Kepentingan	10	4	40	III



Tabel 3. Format KAFE

No	Faktor-Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor (3 x 4)	Kesimpulan (Prioritas)
1	2	3	4	5	6
PELUANG					
1	Kebutuhan sumber daya air dan lahan	9	3	27	V
2	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS	12	4	48	I
3	Kebijakan pembentukan forum DAS	11	4	44	II
4	Komitmen bersama antar pemangku kepentingan	10	4	40	III
5	Peran LSM dan Perguruan Tinggi	8	4	32	IV
TANTANGAN / ANCAMAN					
1	Proses hidrologi wilayah berubah, menurunkan ketersediaan air	12	3	36	III
2	Sistem Politik, Kebijakan pemerintah dan otonomi daerah	9	3	27	IV
3	Biaya Pengelolaan DAS yang besar	11	4	44	I
4	Air tidak hanya bernilai sosial tapi juga bernilai ekonomi	8	3	24	V
5	Kemampuan keuangan negara	10	4	40	II
		100			

Setelah dilakukan pembobotan dan rating dari faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, kemudian diskor dan diurut sesuai ranking tertinggi, lalu dilakukan analisis lanjutan berdasarkan masing-masing kotak pilihan SO, WO, ST, WT yang merupakan asumsi strategi.



Tabel 4. Formulasi Kunci Keberhasilan (FKK)

FKK MISI	
1. Konservasi SDA dan Lahan secara berkelanjutan (M1)	<ol style="list-style-type: none">1. Manfaatkan dukungan peraturan perUUan kebijakan dan prosedur pengelolaan DAS untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi (S1-O1) Atasi belum kuat dan mengikatnya peraturan perUUan terhadap seluruh stakeholders dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUUan (W1-O1)2. Manfaatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengatasi menurunnya ketersediaan air akibat perubahan proses hidrologi wilayah. (S3-O3)3.
2. Pendayagunaan SDA dan Lahan yang adil bagi berbagai kebutuhan masyarakat (M2)	<ol style="list-style-type: none">1. Atasi kewenangan kelembagaan yang belum terpadu untuk mengatasi kemampuan keuangan negara yang terbatas (W2-T2) Manfaatkan kewenangan Kelembagaan pengelolaan DAS untuk mengatasi ancaman terbatasnya kemampuan keuangan negara (S2-O2)2.
3. Pengendalian dan Penanggulangan daya rusak air dan lahan (M3)	<ol style="list-style-type: none">1. Atasi belum kuat dan mengikatnya peraturan perUUan terhadap seluruh stakeholders untuk mengatasi biaya pengelolaan DAS yang besar (W1-T1) Atasi kewenangan kelembagaan yang belum terpadu untuk mengatasi kemampuan keuangan negara yang terbatas (W2-T2)2.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam pengelolaan SDA dan Lahan (M4)	<ol style="list-style-type: none">1. Atasi belum maksimalnya Pola Pengelolaan DAS melalui komitmen bersama antar stakeholders (W3-O3) Manfaatkan adanya kewenangan pengelolaan DAS untuk melaksanakan kebijakan pembentukan forum DAS (S2-O2)2. Atasi kewenangan kelembagaan yang belum terpadu melalui kebijakan pembentukan forum



<p>5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi SDA dan Lahan (M5)</p>	<p>DAS (W2-O2)</p> <p>1. Atasi Pemahaman Pengelolaan DAS oleh Pemangku Kepentingan untuk mengatasi menurunnya ketersediaan air akibat perubahan proses hidrologi wilayah (W3-T3).</p> <p>Atasi belum kuat dan mengikatnya peraturan perUUan terhadap seluruh stakeholders untuk mengatasi biaya pengelolaan DAS yang besar (W1-T1)</p> <p>FKK :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perUUan2. Adanya kebijakan pembentukan forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders3. Adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha <p>Adanya Pemahaman Pengelolaan DAS oleh Pemangku Kepentingan</p>
--	---

4. KESIMPULAN

Setelah didapatkan faktor kunci keberhasilan sebagaimana tabel di atas, maka selanjutnya ditentukan kesimpulan, sebagai berikut :

- 1) Dapat meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS
- 2) Mewujudkan pembentukan Forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders
- 3) Mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS
- 4) Mewujudkan Pemahaman Bersama Pengelolaan DAS oleh Pemangku Kepentingan



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonimous, Pedoman Teknis Pengelolaan DAS Terpadu, Sekretariat TKPSDA, Jakarta, 2003.
- [2] Irawadi, Abi Prabowo dan Sigit Supadmo Arif, Kajian Penelitian Manajemen Aset Daerah Aliran Sungai: Studi Kasus DAS Logawa di Banyumas, Diskusi Interaktif Nasional Pengelolaan Wilayah Sungai Terintegrasi untuk Keberlanjutan Sumberdaya Air , Purwokerto, 2006.
- [3] Anonimous, Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, 2008.
- [4] Mani, K.E.S fan Setiawan, A. *Kelembagaan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai, disampaikan dalam konfrensi dan seminar BKPSL*, Pekanbaru:14-16 Mei 2010, 2010.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,Pasal 42; 2012.
- [6] Anonimous, LAN-RI, Kajian Manajemen Stratejik, Modul 3, Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Jakarta, 2012.
- [7] Anonimous, LAN-RI, Pedoman Perumusan Kebijakan (Edisi Revisi), Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Jakarta, 2012.
- [8] Budiati Lilin, Good Governance (Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- [9] Sucipto, Kajian Sedimentasi di Sungai Kaligarang dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kaligarang – Semarang (Tesis), Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Undip, Semarang, 2008.
- [10] JDIH PUPR, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Jakarta, 2019.